

2023



LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 DESEMBER 2023

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Sukabumi, Januari 2024
Kepala Pengguna Anggaran.

[Handwritten Signature]
Dj. Tedy Dirhamsyah, SP., M.AB
NIP. 197211162003121001

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	21
B.2. Belanja	22
B.3. Belanja Pegawai	24
B.4. Belanja Barang	24
B.5. Belanja Modal	25
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	27
C.1.2. Persediaan	27
C.2. Aset Tetap	28
C.2.1. Tanah	28
C.2.2. Peralatan dan Mesin	29
C.2.3. Gedung dan Bangunan	30
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	31
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	31
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
C.3. Aset Lainnya	33
C.3.1. Aset Tak Berwujud	33
C.3.2. Aset Lain-lain	33
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.4.1. Uang Muka dari KPPN	35
C.5. Ekuitas	35
C.5.1. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36
D.2. Beban Pegawai	36
D.3. Beban Persediaan	37
D.4. Beban Barang dan Jasa	38
D.5. Beban Pemeliharaan	39
D.6. Beban Perjalanan Dinas	39

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1. Ekuitas Awal	42
E.2. Surplus/Defisit-LO	42
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	42
E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi	42
E.4. Transaksi Antar Entitas	42
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	43
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	43
E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	43
E.5. Ekuitas Akhir	43
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	44
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	44
F.2. Pengungkapan Lain-lain	44

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran. (b) Neraca. (c) Laporan Operasional. (d) Laporan Perubahan Ekuitas. dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukabumi. Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran.

Dr. Tedy Dirhamsyah. SP.. M.AB
NIP. 197211162003121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar periode 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp337.304.750.00 atau mencapai 123.22% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp273.500.000.00

Realisasi Belanja Negara pada sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.419.720.083.00 atau mencapai 97.08% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.753.760.000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp921.653.611.365.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp381.210.500.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp921.266.654.615.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.746.250.00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp921.653.611.365.00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp921.653.611.365.00

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp319.558.000.00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.253.277.080.00

sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-12.203.719.080.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp17.746.750.00 dan Defisit Rp-12.185.972.330.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-12.185.972.330.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp1.024.011.168.362.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp12.185.972.330.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp90.171.584.667.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp921.653.611.365.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	273.500.000.00	337.304.750.00	123.33	591.888.767.00
Jumlah Pendapatan		273.500.000.00	337.304.750.00	123.33	591.888.767.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.375.671.000.00	3.347.763.529.00	99.17	6.741.524.833.00
Belanja Barang	B.4.	6.629.059.000.00	6.323.086.554.00	95.38	7.182.011.752.00
Belanja Modal	B.5.	749.030.000.00	748.870.000.00	99.88	70.595.000.00
Jumlah Belanja		10.753.760.000.00	10.419.720.083.00	97.08	13.994.131.585.00

II. NERACA

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0.00	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0.00	0.00
Persediaan	C.1.4.	381.210.500.00	313.995.000.00
Jumlah Aset Lancar		381.210.500.00	313.995.000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	886.441.447.000.00	986.695.447.000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	38.053.668.045.00	38.019.130.045.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	34.594.467.050.00	33.880.135.050.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	5.940.437.975.00	5.940.437.975.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	39.919.000.00	39.919.000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	631.279.250.00	631.279.250.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(44.434.563.705.00)	(41.515.384.958.00)
Jumlah Aset Tetap		921.266.654.615.00	1.023.690.963.362.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	9.275.000.00	9.275.000.00
Aset Lain-lain	C.3.2.	248.498.000.00	248.498.000.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(252.026.750.00)	(251.331.125.00)
Jumlah Aset Lainnya		5.746.250.00	6.441.875.00
Jumlah Aset		921.653.611.365.00	1.025.804.041.613.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga III	C.4.1	0.00	0.00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban		0.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	921.653.611.365.00	1.024.011.168.362.00
Jumlah Ekuitas		921.653.611.365.00	1.024.011.168.362.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		921.653.611.365.00	1.024.011.168.362.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	319.558.000.00	591.022.460.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		319.558.000.00	591.022.460.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.347.763.529.00	6.741.524.833.00
Beban Persediaan	D.3.	730.502.200.00	1.350.537.000.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.683.831.975.00	4.025.391.452.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.416.643.156.00	1.522.186.200.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	585.278.823.00	511.802.500.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	160.385.100.00	690.000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.919.642.497.00	3.697.064.116.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		12.844.047.280.00	17.849.196.101.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.524.489.280.00)	(17.258.173.641.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	17.746.750.00	543.221.307.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		17.746.750.00	543.221.307.00
SURPLUS/DEFISIT – LO		(12.506.742.530.00)	(16.714.952.334.00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	1.024.011.168.362.00	1.027.323.877.878.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(12.185.972.330.00)	(16.714.952.334.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	(90.171.584.667.00)	13.402.242.818.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(102.357.556.997.00)	(3.312.709.516.00)
EKUITAS AKHIR	E.6.	921.653.611.365.00	1.024.011.168.362.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI-TRI) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon III dibawah Pusat Standar Instrumen Perkebunan. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan). Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI-TRI) terselenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 menyelenggarakan fungsi :

- A. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- B. Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- C. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman industri dan penyegar;
- D. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman industri dan penyegar;
- E. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrument tanaman industri dan penyegar;
- F. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman industri dan penyegar
- G. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Industri dan Penyegar.

Sebagai salah satu UPT lingkup Kementan maka Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI-TRI) berkewajiban untuk mendukung target sukses Kementan yang tercantum dalam rencana strategis Kementan. serta dalam perjanjian kinerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Pusat Standar Instrumen Perkebunan. Sejalan dengan konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 serta visi Kementerian Pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Pusat Standar Instrumen Perkebunan maka Visi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI-TRI) adalah : **“Menjadi Balai Pengujian Berstandar Kelas Dunia Untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Tanaman Industri dan Penyegar”**.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan. Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	273.500.000.00	273.500.000.00
Jumlah Pendapatan	273.500.000.00	273.500.000.00
Belanja		
Belanja Pegawai	4.056.150.000.00	3.375.671.000.00
Belanja Barang	5.649.471.000.00	6.629.059.000.00
Belanja Modal	0.00	749.030.000.00
Jumlah Belanja	9.705.621.000.00	10.753.760.000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp337.304.750.00.00 atau mencapai 123.33% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp273.500.000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Budidaya	168.350.000.00	232.059.000.00	137.48
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	105.150.000.00	83.056.000.00	79.99
Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	0.00	4.443.000.00	100
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0.00	0.00	0.00

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	17.746.750.00	100
Jumlah	273.500.000.00	337.304.750.00	123.33

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 43.01% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2023 terjadi reorganisasi sehingga tidak ada kegiatan penelitian yang menjadi sumber PNBP.

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Budidaya	232.059.000.00	444.730.000.00	(47.82)
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	83.056.000.00	75.086.460.00	10.61
Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	4.443.000.00	11.706.000.00	(62.05)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0.00	59.500.000.00	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	17.746.750.00	866.307.00	(1.988)
Jumlah	337.304.750.00	591.888.767.00	(43.01)

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.994.131.585.00 atau 97.08% dari anggaran belanja sebesar Rp10.419.720.083.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.375.671.000.00	3.367.341.141.00	99.75
Belanja Barang	6.629.059.000.00	6.323.086.554.00	95.38
Belanja Modal	749.030.000.00	748.870.000.00	99.88
Total Belanja Kotor	10.753.760.000.00	10.439.297.695.00	97.08
Pengembalian Belanja		19.577.612.00	
Total Belanja	10.753.760.000.00	10.419.720.083.00	97.08

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 25.24% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp-3.393.761.304.00 atau 50.34% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan terdapat pegawai yang beralih ke BRIN dan pegawai yang memasuki masa pensiun.
2. Penurunan Belanja Barang sebesar Rp858.925.198.00 atau 11.96% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan tidak ada kegiatan penelitian karena reorganisasi kelembagaan. Alokasi Belanja Barang masih di dominasi dari kegiatan rumah tangga perkantoran dan pemeliharaan kebun. Sedangkan Belanja Barang yang untuk mendukung tupoksi Balai merupakan kegiatan program Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.
3. Kenaikan Belanja Modal sebesar Rp678.275.000.00 atau 960.80% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan pada bulan September 2023 terdapat penambahan alokasi belanja modal renovasi gedung dan bangunan senilai Rp714.430.000.00.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	3.347.763.529.00	6.741.524.833.00	(50.34)
Belanja Barang	6.323.086.554.00	7.182.011.752.00	(11.96)
Belanja Modal	748.870.000.00	70.595.000.00	960.80
Total Belanja	10.419.720.083.00	13.994.131.585.00	(25.54)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.375.671.000.00 dan Rp6.741.524.833.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 15% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp-3.393.761.304.00 atau 50.34% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan terdapat pegawai yang beralih ke BRIN dan pegawai yang memasuki masa pensiun.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.300.364.141.00	6.678.690.102.00	(50.58)
Belanja Lembur	66.977.000.00	74.569.000.00	(10.18)
Jumlah Belanja Kotor	3.367.341.141.00	6.753.259.102.00	(50.14)
Pengembalian Belanja Pegawai	-19.577.612.00	-11.734.269.00	329.75
Jumlah Belanja	3.347.763.529.00	6.741.524.833.00	(50.34)

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.323.086.554.00 dan Rp7.182.011.752.00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 11.96% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan Belanja Barang sebesar Rp858.925.198.00 atau 11.96% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan tidak ada kegiatan penelitian karena reorganisasi kelembagaan. Alokasi Belanja Barang masih di dominasi dari kegiatan rumah tangga perkantoran dan pemeliharaan kebun. Sedangkan Belanja Barang yang untuk mendukung tupoksi Balai merupakan kegiatan program Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.408.128.300.00	2.317.474.550.00	3.91
Belanja Barang Non Operasional	718.085.000.00	1.088.910.000.00	(34.05)
Belanja Barang Persediaan	632.332.600.00	1.124.571.600.00	(43.77)
Belanja Jasa	562.618.675.00	619.006.902.00	(9.11)
Belanja Pemeliharaan	1.416.643.156.00	1.520.246.200.00	(6.81)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	585.278.823.00	511.802.500.00	(14.36)
Jumlah Belanja Kotor	6.323.086.554.00	7.182.011.752.00	(11.96)
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	6.323.086.554.00	7.182.011.752.00	(11.96)

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp748.870.000.00 dan Rp70.595.000.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 960.80% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Belanja Modal sebesar Rp678.275.000.00 atau 960.80% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan pada bulan September 2023 terdapat penambahan alokasi belanja modal renovasi gedung dan bangunan senilai Rp714.430.000.00.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.538.000.00	70.595.000.00	(51.08)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	714.332.000.00	0.00	100
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	748.870.000.00	70.595.000.00	960.80
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	748.870.000.00	70.595.000.00	960.80

Rincian Belanja Modal
31 Desember 2023

Uraian Belanja Modal	Nilai Belanja Modal
Pengadaan Alat Sortasi Benih Kopi	34.538.000.00
Renovasi Gedung Kantor Gunung Putri	196.130.000.00
Renovasi Pagar Kantor	190.490.000.00
Pembangunan Pagar Kantor Cahaya Negeri	128.300.000.00
Renovasi Interior Lobby dan Ruang Rapat AWR	199.412.000.00
Jumlah Belanja Modal	748.870.000.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
1. Saldo UP	0.00
Jumlah	0.00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 merupakan kas lainnya dan setara kas. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
1. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00
Jumlah	0.00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. merupakan piutang bukan pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
1. Piutang Bukan Pajak	0.00
Jumlah	0.00

C.1.5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp381.210.500.00 dan Rp313.995.000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	1.161.400.00	0.00
Bahan Baku	0.00	313.995.000.00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	380.049.100.00	
Jumlah	381.210.500.00	313.995.000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp886.441.447.000.00 dan Rp986.695.447.000.00.

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	258.265 m2	Jl. Raya Pakuwon Parungkuda Km.2 Sukabumi	150.955.893.000
2.	253.565 m2	Jl. Raya Pakuwon Parungkuda Km.2 Sukabumi	146.877.527.000
3.	150.220 m2	Jl. Raya Pakuwon Parungkuda Km.2 Sukabumi	68.875.870.000
4.	532.493 m2	Jl. Raya Pakuwon Parungkuda Km.2 Sukabumi	287.013.727.000
5.	216.000 m2	Jl. Raya Pakuwon Parungkuda Km.2 Sukabumi	125.118.000.000
6.	485.527 m2	Desa Cahaya Negri Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara	216.000.000
7.	300.000 m2	Desa Cahaya Negri Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara	80.220.000.000
9.	181 m2	Desa Sukatani Kec. Pacet Kab. Cianjur	73.305.000
10.	67.425 m2	Desa Sukatani Kec. Pacet Kab. Cianjur	27.307.125.000
Jumlah			886.441.447.000

Permasalahan yang perlu disampaikan terkait permasalahan tanah yang dikuasi pihak ke tiga pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar sebagai berikut:

- Terdapat Sertifikat Ganda pada bidang tanah Sertifikat N0.3 Desa Parungkuda (2.01.02.03.003 NUP.01) seluas 4.750 m² dengan PT. PURI ISKA. Kondisi dilapangan telah dibangun pagar arcon dan bangunan Pos penjagaan dan aktivitas rencana pembangunan perumahan.

- Terdapat Sertifikat Ganda pada bidang tanah Sertifikat N0.3 Desa Parungkuda (2.01.02.03.003 NUP.01) seluas 6.000 m² dengan SMPN 2 Parungkuda.

Dalam rangka penyelesaian terkait permasalahan tanah yang dikuasi pihak ke tiga pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Telah diterbitkan surat somasi I s.d. III untuk penghentian aktivitas oleh Biro Hukum kepada PT. PURI ISKA. Sampai saat laporan ini dibuat masih terdapat aktivitas pembangunan perumahan.
- Telah mengajukan surat permohonan pengukuran bidang untuk keperluan pengembalian batas atas bidang tanah yang bersengketa kepada BPN Kab. Sukabumi dengan nomor surat permohonan B-425/HK.220/H.4.4/04/2020 tanggal 21 April 2020 sampai saat laporan ini dibuat belum ada tanggapan dan tindak lanjut dari BPN Kab. Sukabumi.
- Pada tanggal 19 Maret 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Biro Hukum Kementerian Pertanian. Sekretariat Badan Litbang Pertanian dengan Pihak BPN Kab. Sukabumi. Hasil rapat sebagai berikut :
 1. Peta untuk tanah Balitri tidak terpetakan dalam database perpetaan BPN.
 2. Apabila ada bukti lain yang lebih kuat maka sertifikat bisa dibatalkan.
 3. BPN menyarankan untuk Tracking Digital untuk pemetaan dan ploting database perpetaan BMN.
 4. Peta sertifikat hak pakai no. 3 belum terfloting pada database pemetaan BPN.
- Telah mengirimkan surat permohonan audiensi dengan pihak BPN nomor B-1800/PL.310/H.1/07 Tanggal 02 Juli 2022
- Telah mengirimkan surat Pengaduan dalam rangka menyelamatkan Aset Pemerintah Republik Indonesia ke BPN Kab. Sukabumi dengan nomor surat B-808/HK.220/H.4.4/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022.
- Telah mengirimkan surat permohonan bantuan penyelesaian permasalahan tanah ke Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan nomor surat B-1708/HK.410/H.1/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
- Telah mengirimkan surat Pengaduan ke- 2 dalam rangka menyelamatkan Aset Pemerintah Republik Indonesia ke BPN Kab. Sukabumi dengan nomor

surat B-138/HK.220/H.4.4/02/2022 tanggal 21 Februari 2022. Tetapi tidak ada respond dari pihak BPN. Kab. Sukabumi

- Permohonan Bantuan Penanganan Permasalahan Tanah Balittri ke Satuan Tugas Saber Pungli Kemen Polhukam RI. Dengan nomor surat B-185/HK.220/H.4.4/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 (surat terlampi). dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak Satuan Tugas Saber Pungli Kemen Polhukam RI dengan mengadakan rapat koordinas antara Satuan Tugas Saber Pungli Kemen Polhukam RI. BPN. Kab. Sukabumi dan Badan Litbang Pertanian (Balittri) pada tanggal 17 Maret 2022.
- Telah mengirimkan kembali surat penyemapain kronologis permasalahan ke BPN Kab. Sukabumi atas tindak lanjut dari pertemuan dengan pihak Saber Pungli Kemenpolhukam dan BPN Kab. Sekabumidengan nomor surat B-223/HK.220/H.4.4/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
- Tanggal 27 Maret 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi permasalahan tanah lingkup BSIP bersama Tim Inspektorat Investigasi dengan kesimpulan rapat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah llingkup BSIP-TRI (Balittri) akan bekerja sama dengan melibatkan APK (aparap penegak hukum) pada masalah ini melibatkan Kejaksaan.
- BSIP Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat ke BPN Kab. Sukabumi dengan nomor surat B-547HK.410/H.1/03/2023 tanggal meminta Agar dilakukan gelar perkara di Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi atas permasalahan terbitnya 17 SHGB dan 2 SHM atas nama pihak lain di atas Sertifikat Hak Pakai No.3 Tahun 1990 seluas 258.265 m yang dikelola oleh Balitri Balitbangtan Kementan
- Pada tanggal 14 Juni 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan gelar perkara sengketa pertanahan atas Sertifikat Hak Pakai No.3 Tahun 1990 seluas 258.265 m² yang dikelola oleh Balitri Balitbangtan Kementan.
- Berdasarkan surat undangan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi Nomor 653/UND-32.02.PPS.01.01/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023 perihal Klarifikasi/ Mediasi Penyelesaian Permasalahan Dugaan Penguasaan BMN Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di BPSI Tanaman Industri dan Penyegar oleh Pihak Lain. Ringkasan hasil mediasi/klarifikasi
- Berdasarkan surat undangan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi Nomor 922/UND32.02.PPS.01.01/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 perihal Klarifikasi/ Mediasi II Penyelesaian Permasalahan Dugaan Penguasaan BMN Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di BPSI Tanaman Industri dan Penyegar oleh Pihak Lain

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.053.668.045.00 dan Rp38.019.130.045.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	38.019.130.045.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	34.538.000.00
Mutasi Kurang	
-	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	38.053.668.045.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(36.501.270.642.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.552.397.403.00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

- Pengadaan 1 Unit Alat Sortasi Benih Kopi senilai Rp34.538.000.00

Mutasi transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Tidak ada mutasi pengurangan Peralatan dan Mesin selama periode 31 Desember 2023.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.594.467.050.00 dan 33.880.135.050.00

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	33.880.135.050.00
Mutasi Tambah	
Renovasi Gedung Kantor Gunung Putri	196.130.000.00
Renovasi Pagar Kantor	190.490.000.00
Pembangunan Pagar Kantor Cahaya Negeri	128.300.000.00
Renovasi Interior Lobby dan Ruang Rapat AWR	199.412.000.00
Mutasi Kurang	
-	0.00

Saldo per 31 Desember 2023	34.594.467.050.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(5.401.421.682.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	29.193.045.368.00

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

- Renovasi Gedung Kantor Gunung Putri senilai Rp196.130.000.00
- Renovasi Pagar Kantor senilai Rp190.490.000.00
- Renovasi Pagar Kantor Cahaya Negeri senilai Rp128.300.000
- Renovasi Interior Lobby dan Ruang Rapat AWR senilai Rp199.412.000

pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Tidak ada mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan selama periode 31 Desember 2023.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.940.437.975.00 dan Rp5.940.437.975.00.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2020	5.940.437.975.00
Mutasi Tambah	
-	0.00
Mutasi Kurang	
-	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	5.940.437.975.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2.531.871.381.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.408.566.594.00

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

- Tidak ada mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode 31 Desember 2023

Mutasi transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Tidak ada mutasi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode 31 Desember 2023.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.919.000.00 dan Rp39.919.000.00.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2020	39.919.000.00
Mutasi Tambah	
-	0.00
Mutasi Kurang	
-	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	39.919.000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	39.919.000.00

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya adalah berupa:

- Tidak ada mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya selama periode 31 Desember 2023

Mutasi transaksi pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa :

- Tidak ada mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya selama periode 31 Desember 2023.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp631.279.250.00 dan Rp631.279.250.00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut :

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	631.279.250.00
Perencanaan Pembangunan Paving Block TSP	47.781.000.00
Perencanaan Pengerasan Jalan Kebun TSP	47.781.000.00
Perencanaan Pembangunan Gedung Display	317.325.250.00
Perencanaan Pembangunan Aula KP Cahaya Negeri	33.411.000.00
Perencanaan Pembangunan Pagar KP Cahaya Negeri	33.411.000.00

Perencanaan Pembangunan Papan Nama TTP KP Cahaya Negeri	32.751.000.00
Perencanaan Rehabilitasi Rumah Negeri KP Cahaya Negeri	53.375.000.00
Perencanaan Pembangunan Paving Block Dan Pengerasan Jalan KP Cahaya Negeri	65.444.000.00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.515.384.958.00 dan Rp41.515.384.958.00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	38.053.668.045.00	(36.501.270.642.00)	1.552.397.403.00
2.	Gedung dan Bangunan	34.594.467.050.00	(5.401.421.682.00)	29.193.045.368.00
3.	Jalan. Irigasi dan Jaringan	5.940.437.975.00	(2.531.871.381.00)	3.408.566.594.00
Akumulasi Penyusutan		77.879.622.070.00	(44.434.563.705.00)	33.445.058.365.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.275.000.00 dan Rp9.275.000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	9.275.000.00
Jumlah	9.275.000.00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp248.498.000.00 dan 248.498.000.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2022	248.498.000.00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	248.498.000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(248.498.000.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0.00

Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain adalah berupa:

- Tidak ada mutasi penambahan Aset Lain-lain selama periode 31 Desember 2023

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa :

- Tidak ada mutasi pengurangan Aset Lain-lain selama periode 31 Desember 2023

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp252.026.750.00 dan Rp251.331.125.00. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023. sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	9.275.000.00	(3.528.750.00)	5.746.250.00
2.	Aset Lain-lain	248.498.000.00	(248.498.000.00)	0.00
Akumulasi Penyusutan		257.773.000.00	(252.026.750.00)	5.746.250.00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp921.653.611.365.00 dan Rp1.024.011.168.362.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp319.558.000.00 dan Rp591.022.460.00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0.00	59.500.000.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	58.700.000.00	74.700.000.00
Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	4.443.000.00	11.706.000.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Budidaya	232.059.000.00	444.730.000.00
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	24.356.000.00	386.460.00
Jumlah	319.558.000.00	591.022.460.00

Terdapat selisih antara Pendapatan Negara Bukan Pajak pada laporan LRA dan LO senilai Rp17.746.750.00. Selisih tersebut merupakan nilai Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp17.746.750.00. Akun tersebut tidak termasuk didalam laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak di dalam LO karena pada laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak LO merupakan laporan transaksi tahun berjalan.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.347.763.529.00 dan Rp6.741.524.833.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Gaji Pokok PNS	2.299.103.525.00	4.056.810.499.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	39.814.00	55.964.00
Beban Tunj. Anak PNS	46.513.142.00	72.517.306.00
Beban Tunj. Beras PNS	140.567.220.00	218.708.400.00
Beban Tunj. Fungsional PNS	147.985.000.00	1.234.095.000.00
Beban Tunj. PPh PNS	4.664.162.00	91.308.800.00
Beban Tunj. Struktural PNS	16.920.000.00	10.080.000.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	157.479.666.00	291.126.864.00
Beban Tunjangan Umum PNS	80.660.000.00	84.000.000.00
Beban Uang Lembur	66.977.000.00	74.569.000.00
Beban Uang Makan PNS	386.854.000.00	608.253.000.00
Jumlah	3.347.763.529.00	6.741.524.833.00

Tidak terdapat selisih antara Beban Pegawai yang terdapat di LO dan Belanja Pegawai pada laporan realisasi anggaran. Beban Pegawai di LO dan Belanja Pegawai di LRA per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.347.763.529.00.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp730.502.200.00 dan Rp1.350.537.000.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Persediaan bahan baku	153.649.100.00	277.461.200.00
Beban Persediaan konsumsi	558.853.100.00	1.061.643.600.00
Beban persediaan lainnya	18.000.000.00	11.432.200.00
Jumlah	730.502.200.00	1.350.537.000.00

Tidak terdapat selisih antara Beban Persediaan yang terdapat di LO dan Beban Barang Habis Pakai di Aplikasi Sakti Modul Persediaan Beban Persediaan LO per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp730.502.200.00.

D. 4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 3.683.831.975.00 dan Rp4.025.391.452.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Bahan	60.345.000.00	18.160.000.00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	268.400.000	930.750.000.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	20.000.000.00
Beban Barang Operasional Lainnya	108.579.000.00	81.363.000.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	145.140.000.00	151.560.000.00
Beban Honor Output Kegiatan	387.520.000.00	140.000.000.00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	2.598.000.00
Beban Jasa Profesi	16.200.000.00	29.400.000.00
Beban Keperluan Perkantoran	2.142.050.000.00	2.040.831.000.00
Beban Langganan Air	51.864.000.00	54.619.800.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	79.480.828.00	77.516.588.00
Beban Langganan Listrik	408.981.289.00	451.824.729.00
Beban Langganan Telepon	2.842.558.00	3.047.785.00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.000.000.00	22.800.000.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.179.300.00	920.550.00
Beban Sewa	3.250.000.00	0.00
Jumlah	3.683.831.975.00	4.025.391.452.00

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.416.643.156.00 dan Rp1.522.186.200.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	628.242.855.00	617.633.000.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	80.941.200.00	37.500.000.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	144.895.900.00	174.024.300.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	562.563.201.00	691.088.900.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0.00	1.940.000.00
Beban Persediaan suku cadang	0.00	0.00
Jumlah	1.416.643.156.00	1.522.186.200.00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp585.278.823.00 dan Rp511.802.500.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Perjalanan Biasa	540.287.823.00	497.402.50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000.00	14.400.000.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.991.000.00	0.00
Jumlah	511.802.500.00	511.802.500.00

D.7. Beban Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp585.278.823.00 dan Rp511.802.500.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	160.385.100.00	690.000.00
Jumlah	160.385.100.00	690.000.00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.919.642.497.00 dan Rp3.697.064.116.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	953.284.624.00	946.244.534.00
Beban Penyusutan Irigasi	88.548.785.00	88.548.785.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	260.529.349.00	260.529.348
Beban Penyusutan Jaringan	61.289.797.00	61.289.797.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.555.526.192.00	2.339.987.902.00
Jumlah	2.919.642.497.00	3.697.064.116.00

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17.746.750.00	543.221.307.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	0.00
Jumlah	17.746.750.00	543.221.307.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.024.011.168.362.00 dan Rp1.027.323.877.878.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-12.185.972.330.00 dan Rp-16.714.952.334.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan. aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-90.171.584.667.00 dan Rp13.402.242.818.00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	10,419,720,083.00
Diterima dari Entitas Lain	(100,591,304,750.00)
Jumlah	(90.171.584.667.00)

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-90.171.584.667.00 sedangkan DKEL sebesar Rp591.888.767.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp921.653.611.365.00 dan Rp1.024.011.168.362.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lain-lain

Selama periode 30 September 2023 DIPA pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mengalami Revisi dengan nomor revisi sebagai berikut :

A. DIPA-018.09.2.412022/2023 Revisi ke 06 tanggal 15 September 2023

Pada revisi menyebabkan perubahan PAGU anggaran dari Rp Rp10.955.621.000.00 menjadi Rp10.955.621.000.00

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	273.500.000.00	273.500.000.00
Jumlah Pendapatan	273.500.000.00	273.500.000.00
Belanja		
Belanja Pegawai	4.056.150.000.00	3.375.671.000.00
Belanja Barang	5.649.471.000.00	6.629.059.000.00
Belanja Modal	0.00	749.030.000.00
Jumlah Belanja	9.705.621.000.00	10.753.760.000.00

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Nomor : 05/Kpts/KU.010/H.4.4/01/2023 Tentang Daftar Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Tedy Dirhamsyah. S.P..M.A.B

Pejabat Pembuat Komitmen : Reza Wibawa Mukti. SE

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Indah Sulistyorini. S.P.. M.Si

Bendahara Pengeluaran : Siti Aminah Handayani. A.md

Bendahara Penerima : Mey Yanti Sijabat. A.md

